

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika mengamati fenomena politik dewasa ini khususnya yang ada di Indonesia, jauh dari apa yang diharapkan. Yang terjadi justru hanya saling memperebutkan kekuasaan. Bahkan menghalalkan segala cara demi merebut dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini semakin lama berakibat pada pandangan masyarakat terhadap politik semakin buruk dan kotor. Ditambah lagi beberapa tahun terakhir ini kerap kali terjadi aksi demonstrasi yang semakin mengancam legitimasi kekuasaan pemerintah. Sehingga penguasa semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya sendiri.

Dalam pemahaman umum kekuasaan dimaknai sebagai suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain baik dari tingkah lakunya agar sejalan dengan kemauan dan keinginan orang yang berkuasa. Dalam politik, kekuasaan bukan hanya mengenai persoalan pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Melainkan termasuk juga kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan atau kebijakan. Keputusan maupun kebijakan ini mampu mengikat semua anggota masyarakat.

Kekuasaan kemudian memunculkan kewenangan. Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa kewenangan ialah kekuasaan yang memiliki keabsahan atau *legitimate power* (Surbakti, 2013). Dalam istilah lain kewenangan ini ialah kekuasaan formal yang sudah memiliki keabsahan dan pengakuan dari rakyat.

Kewenangan ini memunculkan hak-hak tertentu sehingga penguasa dimungkinkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini memiliki sifat *top-down* atau dari penguasa ke rakyat.

Wewenang muncul sebab adanya dukungan dari masyarakat. Penguasa diberi semacam hak untuk melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan tugasnya. Munculnya hubungan antara masyarakat dengan penguasa karena adanya suatu sikap saling paham antara yang memimpin dan dipimpin. Bila kekuasaan dipahami sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang berpengaruh pada proses politik, sementara kewenangan sebagai hak moral untuk memerintah atau melakukan keputusan politik, maka legitimasi adalah bentuk pengakuan atau penerimaan masyarakat terhadap hak moral tersebut.

Legitimasi merupakan suatu tahap yang harus dilalui dan dimiliki yang akan mengantarkan pada tahap memiliki otoritas. Karena legitimasi ini berarti masyarakat menerima dan mengakui kewenangan dan kekuasaan. Legitimasi ini artinya aturan yang memuat keabsahan dan terkandung pengakuan secara resmi dan merupakan kualitas otoritas yang dianggap sah. Weber menyebutkan bahwa otoritas sebuah kekuasaan politik maupun non politik dengan corak profan ataupun corak religius sesungguhnya diperoleh dengan adanya keabsahan atau legitimasi (Triantini, 2019).

Apabila dalam sebuah sistem politik tercipta kesepakatan berkaitan dengan dasar-dasar dan tujuan-tujuan masyarakat, keabsahan akan mampu tumbuh dengan kokoh, sehingga unsur kekerasan dan pemaksaan yang digunakan oleh penguasa bisa diminimumkan. Dengan demikian pemimpin sistem politik akan

berupaya untuk membangun dan mempertahankan legitimasi akan kekuasaannya karena hal ini adalah dukungan yang paling mantap. Karena suatu sistem politik bisa abadi jika sistem politik tersebut seluruhnya memperoleh pengakuan, penerimaan dan dukungan dari rakyat. Jadi legitimasi bukan hanya dibutuhkan oleh pemerintah, namun bagi unsur-unsur sistem politik yang ada. Objek dalam legitimasi ini bukan hanya pemerintah saja namun termasuk unsur-unsur sistem politik lainnya juga. Dalam artian yang lebih luas, legitimasi berarti masyarakat mendukung sistem politik sementara dalam artian sempit berarti dukungan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa.

Realita saat ini penguasa biasanya berlomba-lomba untuk memperoleh legitimasi dari masa agar bisa memperoleh atau mempertahankan kekuasaannya. Alhasil banyak penguasa yang menggunakan cara tertentu yang tidak pantas agar bisa memperoleh legitimasi dari publik. Disinilah letak permasalahan dari legitimasi. Permasalahan legitimasi terletak pada pengambilan keputusan pemimpin yang tidak memakai pertimbangan secara moral dan hanya mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Penguasa berupaya untuk mempertahankan legitimasinya dengan mengharapkan dukungan dari masyarakat. Namun seringkali beberapa keputusan tidak sejalan dengan keinginan dari masyarakat. Akibatnya masyarakat yang merasa dikecewakan terdorong untuk membentuk kekuatan yang akan menentukan kepada siapa legitimasinya.

Pemerintah memang memiliki kekuasaan atau kewenangan akan tetapi pemerintah belum tentu memperoleh legitimasi akan kekuasaannya dari masyarakat. Disatu sisi Pemerintah berupaya untuk mempertahankan

legitimasinya dengan mengharapkan dukungan dari masyarakat. Namun pemerintah itu sendiri juga membuat mereka kehilangan legitimasi dari masyarakat dengan mengeluarkan putusan keputusan politik yang bertentangan dan banyak merugikan masyarakat. Keputusan politik yang berasal dari penguasa tidak bisa dilepaskan dari dampak yang ditimbulkan terhadap krisis legitimasi. Artinya keputusan akan menimbulkan sebuah konsekuensi yang dinilai oleh publik. Kekuasaan seorang penguasa terlegitimasi apabila publik mengakui serta menerima hak moral penguasa dalam pembuatan dan melakukan keputusan yang mampu membuat masyarakat terikat.

Legitimasi menjadi penting karena akan menuju pada kerelaan untuk berbuat sesuatu sehingga penguasa mampu efektif melakukan perannya. Legitimasi secara prinsipnya bisa diperoleh dari orang yang diuntungkan oleh penguasa. Indikator sebuah legitimasi kekuasaan bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, orang atau publik secara sukarela mematuhi keputusan penguasa karena merasa perlu atau karena ingin memperoleh suatu manfaat dalam berbagai macam bentuk. Kedua, tingkat ketaatan pada peraturan, upaya ini untuk menghindari hukuman. Takut terhadap hukuman atau sanksi berarti mereka mengakui adanya pihak penguasa. Ketiga, penilaian positif terhadap otoritas berkaitan dengan karisma seperti para pahlawan atau tokoh terhormat memiliki legitimasi karena dihargai para pengikutnya. Dari segi kepemimpinannya penguasa akan mendapatkan penilaian dari masyarakat apakah layak atau kompeten. Misalnya dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah. Semakin banyaknya masalah

muncul dan tidak terselesaikan menandakan kurangnya kemampuan penguasa. Sehingga legitimasi dari publik pun ikut terkikis.

Membahas mengenai legitimasi kekuasaan, maka penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran Franz Magnis Suseno. Sosok yang dikenal sebagai seorang budayawan, rohaniawan sekaligus filsuf. Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa kekuasaan tak lagi didasarkan pada hubungan informal (dogma atau keyakinan) tetapi berdasarkan pada hubungan formal (perjanjian atau kontrak). Kekuasaan cenderung dipertahankan dan diperebutkan melalui berbagai cara dan negara cenderung telah melakukan tindakan yang represif dalam menghukum warganya untuk memperoleh ketertiban. Kekuasaan selalu berwajah dua yakni mempesona dan menakutkan, sehingga legitimasi sangat dibutuhkan.

Dalam hal ini penguasa dilihat sebagai manusia yang mampu menyadap kekuatan yang berada di alam semesta ini. Seakan-akan penguasa dapat melakukan kontrol terhadap kekuatan kosmis yang menyatakan diri dalam wilayah yang dikuasainya. Franz Magnis Suseno menggambarkan paham kekuasaan Jawa yang bersifat adiduniawi atau mataempiris, maka tidak dapat diperebutkan melalui sarana-sarana bersifat duniawi atau empiris. Faktor-faktor seperti kekuatan fisik dan militer, relasi, kepintaran, kekayaan, dan sebagainya memang juga penting tetapi bukan hal yang menentukan. Maka kekuasaan ini supaya mantap memerlukan adanya legitimasi.

Pemikiran beliau layak untuk dikaji karena menawarkan beberapa alternatif pemecahan masalah dalam bidang politik melalui pandangan kritisnya. Beliau bukan kelahiran Indonesia melainkan dari Eropa yakni Jerman. Meskipun berasal

dari Barat, beliau cukup dikenal sebagai salah satu tokoh yang sering meneliti dan mengkaji terkait fenomena politik maupun budaya Indonesia. Karena ketertarikannya dan kecintaannya terhadap Indonesia beliau bahkan rela pindah kewarganegaraan dan tinggal menetap di Indonesia. Pemikiran-pemikiran kritisnya dalam bidang politik maupun filsafat kejawaannya telah banyak dikaji dan dijadikan sebagai bahan penelitian.

Berdasarkan pada uraian diatas pula penulis tertarik untuk menjadikan sosok Franz Magnis Suseno yang merupakan seorang tokoh agama Katolik sebagai tokoh kajian. Pemikirannya memberikan kontribusi dalam bidang politik bisa dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah khususnya dalam menjelaskan mengenai konsep legitimasi kekuasaan. Pemikirannya unik dan layak untuk diteliti karena menawarkan konsep yang berbeda dengan pemikir-pemikir lainnya yang berhubungan dengan legitimasi kekuasaan seperti konsep yang ditawarkan tokoh lainnya. Konsep pemikiran Franz Magnis Suseno mengandung filsafat Jawa. Dalam bagian ini beliau menyampaikan legitimasi kekuasaan melalui kerangka paham religius dengan contoh paham kekuasaan Jawa.

Menurut Franz Magnis Suseno dalam sebuah kekuasaan akan timbul persoalan mengenai etika dan moral khususnya bagi seorang pemimpin, yang mana hal ini berhubungan erat dengan legitimasi kekuasaan. Berkaitan dengan persoalan mengenai legitimasi kekuasaan diatas maka penulis ingin membahas mengenai konsep legitimasi kekuasaan dalam pemikiran Franz Magnis Suseno. Banyak penelitian yang membahas pemikirannya khususnya dalam bidang etika politik, akan tetapi dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk memfokuskan

dan mendeskripsikan bagaimana pandangan Franz Magnis Suseno mengenai legitimasi kekuasaan.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan dalam latar belakang agar pembahasan nantinya terfokus dengan baik dalam menjelaskan subjek penelitian, penulis memperoleh identifikasi pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana legitimasi kekuasaan dalam pemikiran Franz Magnis Suseno?
2. Bagaimana kekuasaan yang ideal menurut Franz Magnis Suseno?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terfokuskan, terarah dan tidak menyimpang dari apa yang menjadi sasaran pada lingkup masalah pokok yaitu mengenai Konsep Legitimasi Kekuasaan dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno.

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menjelaskan Konsep Legitimasi Kekuasaan dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno. Serta untuk mengetahui bagaimana kekuasaan ideal menurut Franz Magnis Suseno.

E. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran politik terkait Legitimasi Kekuasaan serta menambah wawasan yang telah

didapat dibangku kuliah dan dapat dipergunakan sebagai dasar studi perbandingan dan referensi bagi penulis lainnya yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan untuk praktisi dan akademisis agar menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang memahami Pemikiran Franz Magnis Suseno mengenai konsep legitimasi kekuasaan.